

EPISODE 27 JULI: SABTU KELABU¹

Oleh Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid barangkali salah satu dari sejumlah intelektual kita yang bisa bicara apa saja, tanpa konflik kepentingan. Kini, ia adalah salah satu petinggi di Dewan Pakar ICMI, penggerak Yayasan Wakaf Paramadina, anggota Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan anggota Dewan Penyantun Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) — suatu hal yang bisa dijadikan indikasi minatnya yang serius terhadap masalah penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Ia hanya ingin melihat, tampaknya, bagaimana demokrasi benar-benar diterapkan di Indonesia. Hampir semua pendapatnya bertolak dari itu dan tidak merasa risih, jika harus mengkritik atau bertentangan sikap dengan lembaga, ketika ia menjadi anggotanya.

Itu sebabnya, *DeR* memilihnya untuk diwawancari tentang berbagai hal aktual yang terjadi belakangan ini: dari soal PDI, Peristiwa 27 Juli, hingga KIPP. Berikut petikan wawancara Rachmat H. Cahyono dan M. Husni Thamrin dengan mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

¹ Majalah *DeR*, “Berani Benar, Juga Berani Salah”, No. 05/XXVII/14 September 1996. Pewawancara Rachmat H. Cahyono dan M. Husni Thamrin.

Meski baru sementara, pengumuman temuan Komnas HAM tentang korban Peristiwa 27 Juli, tampaknya mengecewakan banyak pihak

Itu masalah perspektif. Komnas HAM itu terjepit antara suara pemerintah dan suara umum. Pemerintah menganggap Komnas HAM terlalu ceroboh mengumumkan 74 orang hilang. Padahal, yang kami katakan adalah “dilaporkan sebagai hilang”. Jadi, lagi-lagi masalah perspektif. Karena itu, sebagai wujud tanggung jawab, Komnas HAM berusaha betul untuk menindaklanjuti temuan-temuannya.

Bagaimana jika temuan itu menimbulkan masalah dengan pemerintah?

Tidak apa-apa. Justru yang lebih berbahaya, dalam soal menimbulkan masalah itu, adalah pengingkaran kenyataan. Jadi, pemerintah harus mau menerimanya. Sulitnya, 74 yang dilaporkan hilang itu, sebagian besar hanya nama, tanpa alamat. Terus terang saja, kami baru pertama kali menangani yang semacam itu dan itu paling sulit.

Sebetulnya, Peristiwa 27 Juli dan aksi penanganan sesudahnya mencerminkan satu sikap, atau kebijakan pemerintah yang seperti apa?

Harus dilihat dulu latar belakangnya. Sebetulnya, yang menonjol adalah aksi solidaritas kepada Mega. Karena, secara psikologis, orang memang bersimpati kepada yang memelas, yang *underdog*. Dalam hal ini, Mega adalah *underdog* karena ia ditaklukkan oleh kekuatan yang sangat besar, yang sangat dominan, yaitu pemerintah aktif. Itu dengan asumsi bahwa memang Kongres Medan hasil rekayasa, dan saya kira itu bukan rahasia lagi.

Tentu saja ada segi benarnya di balik masalah psikologi itu. Prinsip suatu organisasi sosial (orsos) atau organisasi politik (orpol) yang mandiri itu harus dihormati. Tidak boleh ada intervensi. Kalau kita betul-betul menginginkan suatu orsos atau suatu orpol mencerminkan kehendak orang banyak, dengan sendirinya harus diberikan kebebasan memobilisasi (massa). *Toh*, kalau umum tidak bisa menerima idenya, tidak akan terjadi mobilisasi. Makanya, rakyat itu harus diberi kebebasan.

Ada prinsip-prinsip itu sekitar tanggal 27 Juli?

Kita lihat, mengapa hal itu sampai terjadi. Ya, terang itu persoalan kita semua dan dalam hal ini tidak bisa ditunjuk hidung: siapa yang paling bersalah. Masalah kultur, budaya politik kita, memang masih perlu pengembangan.

Misalnya, kita mulai dengan soal keadaban, *civility*. Kita bicara mengenai *civil society*. Inti dan jiwa dari *civil society* adalah keadaban tadi, yaitu suatu sikap yang berani menerima bahwa orang lain memiliki sikap politik dan hal-hal yang berbeda dengan kita. Juga berani berpandangan bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar untuk suatu persoalan. Karena, manusia itu relatif. Karena itu, sebetulnya *civility* atau keadaban itu sangat erat dengan konsep musyawarah. Proses musyawarah itu proses mutual, proses “saling”. Artinya, tidak ada tinggi dan rendah. Semua orang mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, dan mempunyai kewajiban untuk mendengarkan pendapat.

Saya kira, akumulasi dari tidak adanya *civility* di kalangan PDI sendiri itulah (yang menyebabkan) bencana 27 Juli. Kita tabu bagaimana mereka itu direpotkan oleh konflik internnya. Sebelum adanya intervensi itu, ada friksi intern dulu. Bagaimana dalam sebuah Kongres di Medan (1993) bisa terjadi pendobrakan pintu dengan bulldoser, itu *kan uncivilized*, tidak ada *civility*.

Sekarang, bandingkan dengan NU. Setiap organisasi pasti ada potensi konflik. Itu di mana-mana. NU juga punya, tapi bisa

diselesaikan. Entah sulit, entah mudah, itu soal lain. Tapi, bisa diselesaikan dengan cara yang beradab. Juga ada di Muhammadiyah. Jadi, kalau secara intern sehat sebagai *civil society*, faktor eksternal tidak-bisa masuk. Terbentur duluan. Ini persoalan kita semua. di mana-mana begitu. Bukan hanya PDI. Jadi, orang tidak bisa meniadakan begitu saja, basil musyawarah. Intinya itu: toleransi.

Faktor lainnya, yang sulit itu, adalah masalah legitimasi. Dalam hal ini, saya kira diperlukan pandangan yang agak sedikit lebih adil. Barangkali benar bahwa Soerjadi itu tidak legitimate karena dipilih melalui forum yang direkayasa, tapi bagaimana dengan Mega? Munasnya (1993) itu *kan* juga rekayasa. Beberapa tentara, saya kira Hendropriyono (Mayjen A.M. Hendropriyono, kini komandan Koordinasi Pendidikan dan Latihan TNI AD) dan Agum Gumelar (kini Pangdam Wirabuana) itu punya peran betul. Jadi kita harus adil. Dalam hal ini, memang kita tertumbuk dengan persoalan intern PDI yang menyangkut AD/ART. Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu persoalan mereka.

Tapi, intervensi terhadap kepemimpinan Mega terlalu kasat mata

Karena sistem politik kita, yaitu adanya pembina politik. Jadi, institusi pembina politik itu sudah tidak betul, karena tidak ada dasar hukumnya. Asumsinya, orang itu berpartai untuk merebut kekuasaan secara damai, yaitu melalui pemilu. Kalau menang, berkuasa. Maka, pemerintah sebetulnya, partai yang sedang berkuasa; sedangkan partai yang tidak berkuasa itu sama k:edudukannya dengan pemerintah. Sebab, ada asumsi, nanti, kalau partai yang tidak berkuasa menang (pemilu), dialah yang akan memerintah.

Karena itu, tidak masuk akal ada pembina politik, lalu yang membina itu pemerintah. Itu berarti suatu partai dibina oleh partai lain. Poin ini penting sekali karena kaitannya dengan kemandirian. Karena itu, institusi pembina politik itu sama sekali tidak benar. Itu salah satu agenda reformasi politik yang harus dilenyapkan.

Kasih kebebasan kepada partai-partai, juga Golkar. Sebab, *by definition*, kalau suatu organisasi sudah ikut pemilu dan berjuang memperebutkan kursi, itu namanya partai.

Bahwa Golkar itu *ruling party*, itu boleh. Seperti UMNO di Malaysia atau LDP di Jepang. Tapi, *ruling party* adalah partai yang sedang melakukan *ruling*, *kan* begitu saja. Tidak boleh diidentikkan dengan negara. Kewajiban kita itu membela negara, bukan membela pemerintah. Pemerintah dibela kalau benar. Kalau tidak? Kalau negara, tidak bisa benar atau tidak bisa salah. Negara adalah negara, harus diterima. Jadi, kita mengabdikan kepada negara, bukan kepada pemerintah.

Maka, karena ada masalah pembina politik itu, terjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Karena sekarang yang berkuasa Golkar, pengurus PPP dan PDI itu disahkan Golkar, *kan* begitu. Bagaimana? Itu *kan* tidak fair. Mestinya, kalau memang begitu permainannya, setiap kali ada pemilihan-pemilihan di Golkar harus disahkan PPP dan PDI. PPP dan PDI harus diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan.

Oleh karena itu, ini tidak betul, harus dikembalikan kepada masalah independensi itu lagi. Demikian juga misalnya masalah litsus untuk calon anggota DPR. Litsus itu menjadi alat untuk menentukan bisa tidaknya seseorang diterima dan kriteria itu datang dari pemerintah. Itu berarti wakil rakyat tadi wakil pemerintah, bukan wakil rakyat. Litsus itu juga suatu akibat langsung dari kultur politik yang tidak betul, konsekuensi logis dari suatu sistem politik yang ada pembina politiknya.

Jadi, pemerintah begitu dominan dalam berbagai sektor?

Makanya, itu tidak demokratis.

Dikaitkan dengan kultur politik saat ini, apa memang harus seperti itu kebijakan pemerintah?

Jelas, ini masalah perjalanan sejarah bangsa. Ini masalah budaya pesisir dan pedalaman. Jadi, Indonesia ini dirancang oleh mereka yang asal budayanya itu pesisir. Karena itu, bahasa nasional yang dipilih bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Padahal, orang yang datang ke Kongres Pemuda 1928, banyak orang Jawa.

Karena itu, yang banyak berperan pada masa-masa prakemerdekaan dan pada masa-masa awal kemerdekaan itu orang Sumatera, orang Minang, karena cocok dengan kultur pesisirnya. Selain karena menguasai bahasa Melayu modern, pendidikan mereka juga modern, karena dipilih oleh Belanda untuk menerima pendidikan Belanda. Sama dengan orang Yogya-Solo, Manado, yang dipilih untuk menerima pendidikan Belanda. Karena itu, sebenarnya, peletakan ide-ide dasar kenegaraan kita itu adalah oleh orang-orang Minang. Lihat saja konsep musyawarah-mufakat. Ungkapannya pun banyak mengambil dari bahasa Arab: hakim, hukum, musyawarah, mufakat, dan sebagainya.

Pada waktu itu, orang Jawa belum terlalu menguasai bahasa Melayu. Mereka umumnya berbahasa Belanda dan Jawa. Kalaupun berbahasa Melayu, bahasa Melayu pasar. Jadi, Indonesia itu sebenarnya dirancang dengan pola budaya pesisir. Itu banyak sekali buktinya. Karena itulah langsung demokrasi, meskipun gagal, pada tahun 1950-an. Itulah sebabnya Bung Karno memindahkan ibukota Yogyakarta ke Jakarta. Karena, baru Jakarta, yang meng-indonesia. Jakarta itu *meltingpot*, yang kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya.

Namun, ketika terjadi konsolidasi, terutama setelah revolusi fisik, mulai terlihat, bahwa orang-orang dari pedalaman itu lebih siap memasuki administrasi dan birokrasi, karena mereka sendiri sudah dididik orang Belanda sebelumnya, menjadi *ambtenaall*, pegawai. Masa konsolidasi itu kemudian meneguhkan kultur pedalaman. Pada zaman Bung Karno, proses itu masih tarik-menarik. Pada zaman Pak Harto, yang berperan hanya kultur pedalaman. Pak Harto adalah orang pedalaman betul. Dan Pak Harto, sudah memerintah 30 tahun, ternyata efektif, lebih efektif

daripada masa berkembangnya kultur pesisir pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Ini tentu saja sepanjang berkenaan dengan birokrasi dan kemiliteran. Tentara sebagian besar orang Jawa. Karena, mereka sudah terbiasa berpikir hierarkis, menerima komando.

Namun, itu harus dipandang sebagai solusi jangka pendek. Padahal, ada cita-cita menegakkan demokrasi. Demokrasi itu lebih cocok dengan budaya pesisir. *Nah* ketegangan itulah yang antara lain menjadi muara semua persoalan yang ada saat ini. Di satu pihak dirasakan ada dominasi budaya pedalaman yang tidak pada tempatnya, tapi efektif. Bayangkan saja, Bung Karno berkuasa 20 tahun, segala macam kekacauan ada. Pak Harto berkuasa 30 tahun, hampir tidak ada kekacauan sama sekali. Luar biasa. Itu antara lain karena menggunakan pendekatan kultur pedalaman.

Apa maksudnya solusi jangka pendek itu?

Karena, akan bertentangan dengan cita-cita pertama bangsa Indonesia dan juga bertentangan dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa maritim, bangsa pesisir. Tarik-menarik antara kultur pedalaman dan kultur pesisir itu, dalam beberapa hal, dimenangkan pedalaman, yaitu terutama dalam birokrasi dan administrasi. Karena itu, pedalamanisme tersebut muncul dalam budaya pejabat dan budaya pegawai. Tapi, dalam wawasan Indonesia modern, yang diwakili kaum intelektual, cendekiawan, dan disalurkan melalui bahasa Indonesia, pesisir menang. Bahasa Indonesia saat ini menghancurlumatkan sama sekali bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. Jadi, ada skors plus-minusnya.

Dalam jangka panjang juga yang menang itu pesisir, karena ofensif. Pedalaman itu defensif sekali, bertahan. Contohnya, bahasa Jawa itu tidak lagi mampu memuat pesan-pesan modern yang dapat ditampung bahasa Indonesia. Itu akan punya dampak pada budaya pedalaman. Bahwa sekarang ini masih ada dominasi budaya pedalaman di kantor-kantor, itu masalah waktu saja.

Kalau kultur pedalaman masih mendominasi pemerintahan sekarang ini, apakah itu anugerah atau musibah?

Dilihat dari jangka pendek, itu anugerah. Dilihat dari segi wawasan dan sifat keindonesiaan, itu suatu anomali, suatu hal yang menyimpang — kata musibah mungkin terlalu keras. Yang terang, harus ada *take and give*.

Jadi, kultur politik kita adalah cermin dari pergeseran-pergeseran itu. Posisi dari pihak mereka yang mapan, terhadap kemungkinan perubahan, itu pahit. Karena itu, kemudian, sering salah langkah, sering salah tindak. Tidak usah pemerintah, golongan masyarakat yang mapan pun kalau merasa terancam oleh suatu *emerging forces*, meminjam istilah Bung Karno, suatu kekuatan baru yang sedang muncul, ya, salah tindak semua.

Padahal, Indonesia ini belum selesai prosesnya. Saya perkirakan baru selesai tahun 2020-an. Itu pun tahap pertama. Karena, tekadnya itu negara demokratis, artinya terbuka, sehingga promosi sosial, mobilitas vertikal, tidak lagi berdasarkan hal-hal kenisbatan (askriptif), misalnya sukunya apa, bahasa daerahnya apa, keturunan siapa. Itu tidak lagi relevan, maka kenaikan ke atas dipertaruhkan kepada kemampuan. Satu unsur kemodernan, unsur pesisir sebetulnya, orang berkuasa karena mampu. Dalam hal itu, faktor pendidikan yang berperan.

Ada pengaruhnya bagi orang Islam Indonesia yang kebetulan mayoritas?

Karena pendidikan ini penting sekali dalam mobilitas vertikal, orang Islam relatif paling tepat naik karena mulainya dari minus. Golongan lain sudah lebih dulu di atas, sehingga kenaikannya kecil. *Nah*, kenaikan cepat orang Islam itu menimbulkan perasaan terancam bagi pihak lain. Itu sesungguhnya persoalan yang relatif sekali.

Di kalangan orang Islam pun, yang dominan adalah yang memiliki pendidikan modern. Karena itu, dulu, NU tidak tahan di daerah Masyumi karena didominasi oleh orang-orang berpendidikan Belanda. Tapi, sekarang lihat saja NU, siapa yang paling banyak berperan di situ: orang-orang yang berpendidikan modern.

Jadi, tumbuh golongan intelektual Islam yang jumlahnya besar sekali. Umumnya, mereka membawa suasana jihad, beroposisi kepada pemerintah. Jadi, pada waktu itu, pidato, ceramah, dan khutbah didominasi oleh demagogi. Dan itu berbahaya. Karena itu, kita cari kanalisasi, saluran. ICMI dibuat, sedikit banyak berhasil: mereka masuk. Maka, yang dulu kerjanya mencerca pemerintah, kini kerjanya membela pemerintah. Ada eksesnya, dengan sendirinya. Tapi, garis besarnya begitu.

Ketika mereka masuk, ada ramai-ramai. Entah apalah namanya. Tapi kemudian, ada suara bahwa pemerintah sudah bermesraan dengan (umat) Islam. Pemerintah melakukan hal-hal yang menimbulkan kesan bermesraan dengan Islam, karena menyadari kekuatan itu tidak mungkin dilawan. Itu kekuatan yang tumbuh secara obyektif.

Kenapa pasca-Peristiwa 27 Juli, seolah-olah umat Islam takut kehilangan momen “kemesraan” dengan pernerintah itu, sehingga lahir pernyataan-pernyataan dukungan terhadap kebijakan pemerintah?

Nah, itu psikologi orang yang sudah mempunyai kedudukan. Itu harus dibaca sebagai satu pembelaan diri, memberikan dukungan kepada pemerintah. Dan, kalau Anda dalam posisi mereka, itu logis sekali. Sangat logis.

Ketika pemerintah begitu takut kepada umat Islam, semua dicap sebagai ekstrem kanan, *kan*? Pada tahun 1960-1970-an, sembahyang di kantor saja sudah dianggap ekstrem kanan. Dan, dalam latar politik waktu itu, logis. Makanya, saya bilang, “Islam

yes, Partai Islam, no”. Maksudnya, agar semua orang bisa mengaku Islam dengan bebas.

Sekarang, terbalik, *kan?* Tapi, untuk mereka yang obsesinya bukan kekuasaan, ya, harus tetap melihat keadaan yang sebenarnya. Kalau boleh mengaku, kira-kira saya menempatkan diri dalam posisi seperti itu.

Kini, ada kelompok Islam seperti ICMI dan ada Gus Dur dengan NU-nya, yang agak di luar arus utama. Fenomena itu mencerminkan apa?

Memang, yang naik itu baru kelompok modernis, yang mulai pendidikan umum pada tahun 1950-an, karena adanya kebijakan memasukkan pendidikan umum ke dalam pesantren dan sebaliknya, yang dikeluarkan Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur. Kelompok Islam kota. Kelompoknya Gus Dur itu, baru masuk tahun 1970-an. Oleh karena itu, Gus Dur mewakili suatu kelompok yang merasakan adanya deprivasi, tak terikutkan, tak tersertakan. *Nah*, itu lebih simpel daripada ICMI.

Padahal, secara obyektif, ICMI itu dibuka untuk semuanya. Mereka yang merasa bisa ikut serta, seperti GMNI, masuk saja. Di Sumatera Barat, pengurus ICMI-nya, orang GMNI. *Why not? There is nothing wrong about that.* ICMI itu memang fragmentasi betul. Potensi konfliknya tinggi. Tapi justru karena itu, kalau kita kembali ke masalah keadaban, mungkin punya potensi untuk lebih baik.

Begini tesnya. Bandingkan sikap PPP, HMI, dan ICMI berkeinginan dengan kasus seperti Sri Bintang Pamungkas. Bintang dipecat PPP. Ia anggota Dewan Pakar ICMI. Tapi meski Bintang sudah diadili seperti begitu, tidak satu pun orang ICMI yang berpikir memecat dia. Tidak ada perasaan takut. Waktu Muktamar ICMI kemarin, Bintang dengan enak datang di muktamar dan ketemu dengan siapa saja. Yang menarik, tidak ada stigma sama sekali. *Kan*, enak tuh. *Civility.* Itu ICMI.

Sekarang PPP. Matori Abdul Djalil baru saja ikut Pernyataan Keprihatinan 1 Juli, sudah diurak-urak oleh Hamzah Haz, padahal sama-sama dari NU. Lalu, HMI. Pengurus HMI mengintruksikan siapa saja anggotanya yang aktif dalam Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP), supaya keluar. Itu ironi yang luar biasa. HMI betul-betul melawan kodratnya sendiri. Ketika mereka akan memperingati 50 tahun HMI, tahun 1997, (kalau begini ini namanya) belum tahun emas, tapi tahun besi karatan.

Apa yang bisa dilakukan umat Islam dalam kondisi seperti sekarang?

Kita lagi meniti buih. Salah injak kecemplung. Tapi, karena ini semua bagian dari pertumbuhan bangsa, apa pun yang terjadi, kita harus terus berjalan. Dalam jangka panjang, berbahaya jika orang mengira yang sekarang terjadi bersifat permanen. Ini tidak betul. Misalnya sistem kepartaian. Dari sudut Pak Harto mungkin dipakai sebagai dasar konsensus nasional, memang betul tapi konsensus nasional untuk mengatasi persoalan jangka pendek, yaitu bahaya PKI. Kalau tidak begitu, kita belum tahu bagaimana jadinya Indonesia.

Itu nyata betul, cuma sifatnya darurat, *emergency*. Dan karena *emergency*, tentunya tidak perlu diteruskan. Kalau diteruskan, itu tidak natural, suatu keadaan normal ditangani secara *emergency*.

Dalam kondisi sekarang, kemungkinan pengembangan masyarakat sipil atau masyarakat madani bagaimana?

Pertama, by definition, civil society adalah asosiasi-asosiasi non-pemerintah, tidak hanya *nongovernmental* (NGO), tapi termasuk yayasan, badan, lembaga riset, dan sebagainya, yang independen. Karena itu, *civil society* atau masyarakat madani itu biasanya menjadi penyangga antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, sikapnya melindungi rakyat, tapi kadang-kadang juga menjadi juru bicara

pemerintah kepada rakyat. Yang diperlukan sekarang ini adalah independensi. Karena itu, saya tidak setuju, setiap kali ada orang mendirikan asosiasi kemudian minta restu pemerintah. Tidak betul itu. Termasuk sehabis kongres mesti menghadap. *Wah*, itu berarti menyerahkan independensinya. Itu feodal.

Bisakah independensi itu ditumbuhkan dalam kondisi sekarang?

Independensi itu masalah sikap mental. Karena itu harus dipejajari, dieksperimentalkan. Orang harus belajar independen. Banyak masyarakat yang takut bebas, seperti pernah disinyalir oleh Erich Fromm. Kebebasan itu berarti mengambil tanggung jawab pada diri sendiri. Itu berat. Itulah mengapa Jerman bisa dipimpin seorang Hitler, yang tidak jelas sekolahnya. Karena Hitler mengatakan, “Sudah, serahkan kepada saya saja. Bangsa Jerman akan menjadi besar, bangsa Arya”. Dan karena mengalami kekalahan pada Perang Dunia I, orang Jerman pun berbondong-bondong menyerahkan kebebasannya itu kepada Hitler. Itu *kan* gerakan pengkultusan.

Apakah model semacam itu bisa terjadi di sini?

Jangan sampai. Karena itu, harus ditekankan, selain berani benar, juga harus berani salah. Artinya, eksperimen. Pakistan saja kondisi ekonominya lebih berat dibanding Indonesia, berani bereksperimen dengan demokrasi. Lihat saja Benazir Bhutto. Padahal, kita ini, kata peninjau luar, sebagai *corporate nation* paling berhasil. Dan karena didukung oleh bahasa, kita adalah bangsa baru yang paling sukses dengan bahasa nasional. Kemudian, ada kelengkapan-kelengkapan ideologi kenegaraan, seperti Pancasila dan UUD 1945. Malaysia saja masih kalah dengan kita, Filipina apalagi. India juga. Jadi, artinya, kalau kita bereksperimen dengan demokrasi, jelas ada eksensnya. Tapi insya Allah bisa di-*handle* dengan lebih baik, daripada di Pakistan, India, dan lain-lain. Ini masalah kemauan politik saja.

Dikaitkan dengan adanya Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP)?

KIPP itu sifatnya gerakan moral, tidak mengharapkan dampak legal, apalagi politis. Dampaknya dampak moral, mendidik masyarakat menyangkut demokrasi, dan lebih kepada masalah *civility*, keadaban. Terus terang saja, kita semuanya harus belajar. Berat itu menerima orang lain berbeda. Berat sekali. Kecenderungan kita itu otoriter karena masih feodal, pantang dibantah.

Menyinggung pemilu, satu kontestan saat ini babak belur sebelum bertanding. Apa masih mungkin menghadirkan pemilu yang berkualitas?

Demokrasi tidak terbatas pada pemilu, tapi dalam *civil society*. Jadi pemilu itu dibiarkan saja lewat. Bisa kita anggap sebagai angin lewat saja. Tapi yang penting itu penerapan demokrasi melalui eksperimen-eksperimen: Dan karena eksperimen, jelas saja kemungkinan kita salah. Misalnya kebebasan diterjemahkan menjadi semau-maunya. Itu berbahaya sekali. Bukan begitu demokrasi. Itu pernah diingatkan Bung Hatta dalam bukunya, *Demokrasi Kita*. Itu bisa menjadi manual, buku pegangan buat kita. Demokrasi menurut Bung Hatta, bukan berarti kebebasan tak terbatas. Itu namanya *chaos*. Dan kalau *chaos* yang terjadi, ada pembenaran bagi tampilnya orang kuat. Jadi demokrasi yang dilaksanakan secara salah akan mengundang lawannya sendiri. Itu persis yang diramalkan Bung Hatta akan terjadi dengan Bung Karno. Situasi mendorong Bung Karno tampil jadi diktator.

Makanya, kalau Peristiwa 27 Juli itu tidak terkontrol, kacau betul, pasti akan tampil seorang diktator. [❖]